

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam studi hubungan internasional negara menjadi pelaku utama dalam penentu kebijakan luar negeri untuk mempertahankan kedaulatannya dari berbagai macam ancaman baik internal maupun eksternal. Negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakatnya. Menurut Roger H. Soltau dalam bukunya yang berjudul *“The Study of Political Science”*, negara merupakan sebuah agen atau suatu kewenangan yang dapat mengatur dan mengendalikan segala bentuk persoalan bersama atas nama masyarakat di dalamnya. (Soltau, 1948, p. 348)

Pada hakikatnya negara terdiri dari tiga elemen yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah suatu negara mencakup daratan, laut, dan udara yang berada di bawah kedaulatan negara tersebut. Sedangkan rakyat suatu negara merupakan setiap individu yang memiliki bukti kewarganegaraan dan mengakui otoritas pemerintahan negara tersebut. Kemudian pemerintahan yang berdaulat adalah lembaga yang berwenang untuk mengambil keputusan dan mengatur masyarakat demi menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka dari itu, negara memegang peran penting untuk melindungi segenap bangsanya. Mulai dari menjaga ketertiban serta keamanan masyarakatnya, melindungi hak-hak warga negaranya, dan menunjang kesejahteraan rakyatnya.

Negara juga bertanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi kepentingan nasional baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh sebab itu negara wajib memelihara hubungan yang baik dengan negara-negara lain melalui praktik diplomasi dan kebijakan luar negeri.

Adapun kepentingan nasional yang dimaksud, merupakan kebutuhan dan/atau kepentingan yang dianggap penting bagi suatu negara beserta masyarakatnya. Kepentingan nasional dalam bahasa Perancis disebut *raison d'Etat* yang memiliki makna tujuan dan ambisi suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, militer, hingga budaya. Menurut studi hubungan internasional umumnya konsep kepentingan nasional inilah yang menjadi dasar sebuah negara melakukan hubungan internasional.

Melalui kepentingan nasional, suatu negara dapat menentukan arah kebijakan serta tindakan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negaranya. Kepentingan nasional juga dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Maka setiap negara pasti memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing dan tidak sama satu dengan yang lainnya. Menurut Dr. Umar S. Bakry, kepentingan nasional bukan hanya bicara tentang kekuasaan, tetapi juga kepentingan moral, agama, budaya, dan lain sebagainya, walaupun dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kekuasaan yang cukup (Bakry, 2017, p. 61).

Dalam upaya pemenuhan kepentingan nasional, negara harus terjun dalam arena internasional dengan berbekal kekuatan dan potensi politik luar negerinya.

Sebab politik luar negeri merupakan instrumen terpenting dalam upaya pemenuhan kepentingan nasional di tingkat internasional. Dengan politik luar negeri, negara dapat melindungi dan mengusahakan kepentingan nasionalnya melalui hubungan perdagangan, diplomasi, dan hubungan politik dengan negara lain.

Dalam buku *Turbulence in World Politics: A theory of Change and Continuity*, James N. Rosenau menyebutkan bahwa politik luar negeri merujuk pada interaksi yang terjadi antara dua negara atau lebih yang mempertimbangkan unsur dari dalam negeri dan luar negeri suatu negara. Negara wajib memahami unsur suatu negara yang menjadi negara tujuan (Rosenau, 1990, p. 114). Oleh karenanya dengan menyusun strategi yang baik dan tepat, suatu negara dapat memperkuat kedudukannya di arena internasional serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan keamanan warga negaranya.

Dengan demikian, menyadari kepentingan setiap negara semakin kompleks, melalui konstruksi global terbentuklah organisasi-organisasi internasional yang mewadahi berbagai kerjasama di berbagai bidang dalam rangka pemenuhan kepentingan nasional setiap negara. Organisasi internasional adalah badan yang dibentuk oleh sekelompok negara untuk bekerjasama dalam suatu bidang atau suatu masalah di tingkat internasional. Menurut Dewi Triwahyuni dalam buku berjudul “Menenal Studi Hubungan Internasional”, mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu kelompok yang beranggotakan negara-negara dan memiliki sistem yang tetap atau perangkat sejumlah bidang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama (Triwahyuni, 2022, p. 75)

Hadirnya organisasi internasional membantu negara anggotanya mencapai tujuan bersama melalui koordinasi kerjasama dengan menyediakan forum-forum diskusi dan negosiasi untuk pengambilan keputusan terhadap isu internasional. Organisasi internasional juga berfungsi sebagai penghubung dan penjaga kestabilan hubungan antar negara anggotanya. Jika dikaitkan kembali dengan kepentingan nasional, organisasi internasional menjadi wadah bagi negara anggotanya untuk memajukan kepentingan nasionalnya di kancah internasional.

Tujuan didirikannya organisasi internasional memiliki keragaman latar belakang. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional, WTO (*World Trade Organization*) bertujuan untuk menjaga arus perdagangan dunia, G20 (*Group of Twenty*) bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan dunia, serta ada juga yang bertujuan untuk menjalin kerjasama regional dengan negara-negara tetangga seperti ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan EU (*European Union*).

Pada bulan November 2022, Indonesia telah sukses memegang presidensi sekaligus menjadi tuan rumah pertemuan G20 di Bali. G20 merupakan singkatan dari *Group of Twenty* adalah forum kerjasama multilateral dalam bidang ekonomi yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Negara anggota diantaranya; Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Kelompok negara-negara tersebut telah merepresentasikan 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB

dunia. Oleh karena itu kerjasama G20 bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan dalam rangka menjaga kestabilan keuangan dunia.

Dalam sejarahnya, G20 didirikan pada tahun 1999 untuk mengatasi krisis keuangan global pada rentang tahun 1997-1999 khususnya yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Negara-negara G20 dikumpulkan atas inisiasi dari para anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Itali, Jerman, Kanada, Perancis dan Uni Eropa). Para anggota G7 memutuskan untuk melibatkan negara berpendapatan menengah (*middle income*) yang memiliki pengaruh sistemik terhadap keuangan dunia termasuk Indonesia, untuk bekerjasama menemukan solusi atas kondisi keuangan yang dilanda krisis pada masa itu (Bank Indonesia, 2022, p. 1).

Sejak inisiasi tersebut para menteri keuangan dan gubernur bank sentral rutin mengadakan pertemuan G20 setiap musim gugur, untuk berdiskusi guna merespon krisis keuangan global yang terjadi. Hingga pertemuan G20 pada 14-15 November 2008 di Washington DC, Presiden Amerika Serikat mengundang presiden lainnya dari negara-negara G20 untuk turut menghadiri pertemuan G20 pada saat itu. Pada pertemuan tersebut para pemimpin negara G20 melakukan koordinasi dalam rangka memberi respon global terhadap krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat pada saat itu. Dalam pertemuan tersebut juga para pemimpin negara G20 sepakat untuk menjadikan G20 sebagai Konferensi Tingkat Tinggi seterusnya (Pristiandaru, 2022, p. 1).

Dalam perjalanannya G20 memiliki peranan nyata, terbukti pada 2008 G20 sukses menangani krisis keuangan global. Kala itu G20 juga mendorong peningkatan

kapasitas pinjaman IMF (*International Monetary Fund*). Pada 2012-2015, G20 berhasil meyakinkan 139 negara untuk mengakhiri penghindaran pajak. G20 juga ikut berkontribusi dalam penanganan Covid-19 dengan menginjeksi >5 triliun USD dan memperjuangkan penangguhan utang luar negeri bagi negara berpenghasilan rendah. Serta masih banyak lagi peran lainnya.

Berbeda dari kebanyakan forum atau organisasi internasional lainnya, G20 tidak memiliki sekretariat tetap, sehingga G20 menggunakan konsep presidensi secara bergilir setiap tahunnya oleh salah satu negara anggota. Setiap negara yang bergilir memegang presidensi G20 memiliki hak untuk menentukan agenda prioritasnya menyesuaikan isu ekonomi internasional yang sedang terjadi. Namun agenda prioritas tersebut tetap dalam koridor tujuan utama G20, yaitu: 1) kontribusi stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dunia; 2) regulasi finansial untuk mengurangi risiko dan pencegahan krisis keuangan; serta 3) membangun dan menciptakan arsitektur keuangan internasional.

Presidensi G20 Arab yang dikenal dengan *Riyadh Summit 2020* (21 November 2020) yang menempatkan 3 isu prioritas yaitu: 1) memberdayakan masyarakat (*empowering people*); 2) menjaga planet bumi (*safeguarding the planet*); dan 3) membentuk batasan baru (*shaping new frontier*). Sedangkan presidensi G20 Italia pada 30-31 Oktober tahun 2021 menempatkan 3 isu prioritas pada *people*, *planet*, dan *prosperity* yang tertuang dalam *G20 Heads of State and Government Summit*. Kedua presidensi tersebut dilakukan pada masa pandemi Covid-19, sehingga negara anggota G20 dituntut untuk dapat segera merespon

kondisi global untuk memastikan akses diagnosis, terapi dan vaksin yang adil dan merata di seluruh dunia.

Sebagaimana ditetapkan pada *Riyadh Summit* 2020, Indonesia telah ditetapkan untuk memegang presidensi G20 pada tahun 2022. Presidensi Indonesia untuk G20 2022 telah resmi berlaku dengan ditandai serah terima palu sidang secara simbolis dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Indonesia Joko Widodo pada KTT G20 di Roma, Italia (30-31 Oktober 2021) (Faizahsyah, 2021, pp. 9–15). Berbeda dengan presidensi negara-negara sebelumnya yang dilakukan pada masa pandemi. Indonesia dihadapkan dengan kondisi *new normal* atau pemulihan pasca pandemi yang terfokus pada upaya mengembalikan stabilitas ekonomi dunia.

Memegang presidensi G20, Indonesia mengusung tema “*Recovery Together, Recovery Stronger*”. Bukan tanpa alasan, Indonesia ingin mengajak negara-negara di dunia untuk bekerja sama, bahu membahu, mendukung pemulihan serta pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Indonesia juga menyusun isu prioritas dalam presidensi G20 diantaranya; 1) Mempromosikan Produktivitas (*Promoting Productivity*); 2) Meningkatkan Ketahanan dan Stabilitas (*Increasing Resiliency and Stability*); 3) Menjamin Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Inklusif (*Ensuring Sustainable and Inclusive Growth*); 4) Iklim dan Kemitraan yang Memungkinkan (*Enabling Environment and Partnership*), serta 5) Memperkuat Kepemimpinan Kolektif Global (*Forging Collective Global Leadership*).

Dalam memegang presidensi G20, pemerintahan Indonesia sangatlah bersungguh-sungguh memberikan etos kerja terbaik mulai dari persiapan hingga sampai pada hari pelaksanaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia berhasil menyelenggarakan 437 *working group* dan *engagement group* di 25 kota di Indonesia sejak bulan Desember 2021. Hingga puncak acara yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022, KTT G20 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dinyatakan sukses oleh seluruh negara anggota G20 (Indonesians Government, 2022).

Kesuksesan tersebut ditandai dengan capaian hasil konkret untuk sejumlah proyek dan isu strategis. Adapun capaian konkret yang dihasilkan dari KTT G20 di antaranya 1) terbentuknya Dana Pandemi sebesar 1,5 miliar USD, 2) pembentukan dan operasionalisasi *resilience and sustainability trust* (RST) di bawah dana IMF dengan total jumlah senilai 81,6 miliar USD diperuntukan untuk negara yang menghadapi krisis, 3) Indonesia memperoleh komitmen dari *just energy transition partnership* terkait *energy transition mechanism* sebesar 20 miliar USD (Indonesians Government, 2022).

Di tangan Presiden Joko Widodo pula, G20 Indonesia memiliki agenda menarik yang tidak biasa dilakukan di presidensi sebelumnya yaitu, diplomasi mangrove di hari terakhir penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Dalam agenda tersebut Joko Widodo dan seluruh delegasi negara dan organisasi internasional menanam bibit mangrove sebagai bentuk komitmen G20 terhadap penanggulangan perubahan iklim global. Para pemimpin negara berbaris pada undakan kayu dengan bibit mangrove, lalu secara serempak memasukan bibit tersebut ke dalam lubang

yang kemudian ditutup menggunakan cangkul yang telah disediakan untuk seluruh delegasi (Indonesians Government, 2022).

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama masa presidensi Indonesia untuk G20 sangat mengundang perhatian berbagai kalangan seperti pakar pengamat politik, hingga para pemimpin negara mulai dari Amerika Serikat hingga Perancis yang memberikan apresiasi secara langsung terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Serupa dengan yang lainnya, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang berhasil mendorong dialog dan meraih kesepakatan di tengah situasi yang cukup menantang (Indonesians Government, 2022).

Presidensi G20 Indonesia memiliki perbedaan dengan presidensi G20 sebelum-sebelumnya. Pasalnya pada tahun 2022, merupakan masa titik balik penyesuaian ekonomi dunia setelah keterpurukan pada masa pandemi Covid-19, dan tengah memanasnya situasi geopolitik yang diakibatkan beberapa konflik seperti Taliban, Israel dan Palestina, serta Rusia dan Ukraina. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 tahun 2022. Namun menanggapi hal tersebut, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia menegaskan bahwa G20 bukanlah forum geopolitik, melainkan forum keuangan dan pembangunan dunia dalam kata lain G20 ialah forum ekonomi dunia.

Presiden Indonesia dibantu oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, terus melakukan serangkaian diplomasi untuk menyampaikan pesan

kepada seluruh negara anggota G20, bahwa G20 harus tetap menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global. Pesan tersebut menegaskan tema presidensi G20 Indonesia “*Recovery Together, Recovery Stronger*” yang bermakna pemulihan bersama maka akan menghasilkan pemulihan yang lebih kuat dan lebih baik.

Menyadari kondisi geopolitik akan mempengaruhi komunikasi dalam forum, Presiden Joko Widodo melakukan praktik diplomasi secara langsung dengan mengunjungi negara Rusia dan Ukraina. Kunjungan ke dua negara tersebut dilakukan pada 26-28 Juni 2022, sebelum berlangsungnya KTT G20. Kunjungan tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo untuk meretas perdamaian kedua negara, sebab konflik dua negara tersebut dapat berdampak luas pada negara lain, terutama mengenai krisis pangan di dunia (Saptohutomo, 2022, p. 1). Diplomasi Presiden Joko Widodo menunjukkan posisi Indonesia yang tidak memihak dan menjadi bentuk tanggung jawab Presiden Joko Widodo sebagai pemegang presidensi G20 saat itu kepada Rusia sebagai negara anggota G20, juga terhadap negara-negara Uni Eropa yang juga mengalami kerugian akibat dampak konflik dua negara tersebut.

Kunjungan tersebut membuahkan hasil, sebanyak 37 tamu undangan mulai dari negara anggota, hingga petinggi organisasi internasional terkait dari berbagai negara menghadiri KTT G20 di Bali pada 15-16 Desember. Melalui G20 Indonesia, para pemimpin negara berkomitmen dalam “*G20 Bali Leaders Declaration*”. Deklarasi yang bertotal jumlah 52 paragraf tersebut berisikan komitmen bersama mengenai ketegangan geopolitik global, isu krisis pangan, perubahan iklim, transformasi digital, dan kesehatan global. Selain itu inti dari deklarasi tersebut membahas sikap anggota terhadap perang di Ukraina.

Walaupun melewati diskusi yang alot dalam KTT, namun sebagian besar anggota G20 pada akhirnya menyatakan sikap mengutuk perang di Ukraina dan menekankan bahwa perang tersebut menyebabkan penderitaan manusia juga berpengaruh pada kondisi ekonomi global. Dengan demikian Indonesia di bawah kepemimpinana Joko Widodo dapat memperlihatkan integritasnya dalam memegang presidensi G20 tahun 2022. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya pengaruh peran karakter pemimpin, dalam hal ini idiosinkratik Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin KTT G20 Indonesia.

Idiosinkratik merupakan aspek kehidupan yang mempengaruhi seorang individu dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Aspek tersebut dapat berupa bakat, nilai dan pengalaman hidup seseorang. Presiden Joko Widodo telah memperlihatkan idiosinkratiknya yang cukup istimewa, dan menjadi ciri khasnya. Untuk memahami idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam mengemban tugasnya sebagai presiden dan pemegang presidensi G20, dapat dimulai dari pendekatan kepribadian politik, dan cara pandang serta gaya dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan uraian peristiwa sebelumnya, Presiden Joko Widodo terlihat memiliki gaya kepemimpinan politik *influential* sebab ia memiliki ciri pemimpin negara yang berjiwa nasionalisme yang tinggi, memberikan kepercayaan yang tinggi kepada menteri-menternya, dan memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Gaya kepemimpinan tersebut dibuktikan beliau dengan tercapainya kesepakatan yang dapat menguntungkan negara Indonesia, beliau juga memberi kepercayaan terhadap menteri-menteri di kabinetnya untuk ikut bernegosiasi dalam forum, dan beliau pun

mampu mengarahkan forum sehingga mencapai kesepakatan di tengah diskusi yang alot akibat dampak perbedaan pandangan geopolitik yang memanas.

Selain itu Presiden Joko Widodo juga memperlihatkan sisi kepemimpinan politiknya yang bersifat mediator. Sebagai contoh dari kepribadian Presiden Joko Widodo adalah gaya bicara yang perlahan dalam berdiplomasi sehingga mampu mendapatkan kepercayaan orang setiktarnya. Beliau juga selalu mengusahakan penyelesaian konflik secara damai dan kemanusiaan, serta gencar berdiplomasi untuk perdamaian. Dalam pendekatannya dengan negara-negara di dunia, Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan para menteri di dalam kabinet kerjanya, terutama Menteri Luar Negeri, sebagai perpanjangan tangannya demi menyampaikan isu-isu perdamaian.

Lebih dari pada itu, Presiden Joko Widodo meraih penghargaan bertajuk *Global Leadership Award 2022* atas kesuksesan memimpin jalannya presidensi Indonesia untuk G20 (Abrar, 2022, p. 1). Masih di tahun yang sama Presiden Joko Widodo juga mendapat Penghargaan Perdamaian Internasional dari *Forum Peace Award*, Abu Dhabi atas dedikasinya mewujudkan perdamaian, termasuk kontribusi dalam perdamaian dunia (Indonesia, 2022, p. 1). Serta masih banyak lagi penghargaan yang pernah beliau terima atas kepemimpinannya terdahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo dapat mempengaruhi jalannya Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Dalam penelitian ini akan membahas faktor-faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo yang

mempengaruhi gaya kepemimpinan, pengambilan keputusan hingga dampak gaya kepemimpinannya terhadap dunia internasional melalui aksinya memimpin Presidensi G20 Indonesia.

Terdapat beberapa bahan acuan penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang dapat membantu peneliti untuk dijadikan sebagai rujukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tomy Darma Putra dari Universitas Diponegoro pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Kepribadian Presiden Jokowi dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Pelanggaran Cina di Natuna”. Penelitian ini menganalisis pengaruh idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran Tiongkok di Natuna. Penulis menyimpulkan tindakan yang dilakukan Presiden Jokowi pada kasus tersebut cenderung asertif yakni tegas mempertahankan kedaulatan, namun tetap menjaga hubungan baik dengan Negeri Tiongkok (Darma Putra, 2019, p. 322).

Penelitian yang dilakukan oleh Putra memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh kepribadian Presiden Joko Widodo terhadap sikap dan keputusan negara Indonesia. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada studi kasus yang diteliti. Putra mengangkat kasus pelanggaran Tiongkok di laut Natuna yang dimulai pada tahun 2016-2019, sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis kepribadian Presiden Joko Widodo semasa memimpin Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022. Sehingga penelitian ini menyajikan pembaharuan informasi baik dari pengembangan karakter presiden serta kebijakan Indonesia dalam periode presidensi G20 yang berlatar belakang tahun 2022.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Yudha dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor Idiosinkratik Joko Widodo terhadap Penciptaan Konsep Poros Maritim Dunia”. Dalam penelitian ini penulis menganalisis pengaruh idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia pada sektor kemaritiman tahun 2014. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konsep *Big Five Personality* dalam mengelola data penelitiannya (Yudha, 2020, p. 6).

Dari penelitian tersebut, peneliti melihat beberapa persamaan yaitu mengenai faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia. Namun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu mengenai kebijakan luar negeri Indonesia selama masa presidensi G20 tahun 2022, sedangkan penelitian di atas menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam aspek kemaritiman pada tahun 2014. Sehingga pembaruan dalam penelitian ini terdapat pada variabel penelitian yaitu kebijakan luar negeri Indonesia selama masa presidensi G20 pada tahun 2022, terlebih lagi perbedaan tahun penelitian yang cukup jauh, memungkinkan adanya perkembangan aspek idiosinkratik Presiden Joko Widodo.

Penelitian terdahulu selanjutnya dibuat oleh Muhammad Rizky dari Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2022 dengan judul “Pengaruh Idiosinkratik Donald Trump Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iran (2016-2020)”. Penelitian ini menganalisis pengaruh idiosinkratik Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat periode tahun 2016-2019

terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam pengelolaan data penelitiannya (Rizky, 2022).

Peneliti menyadari adanya persamaan dengan penelitian di atas, yaitu mengenai faktor idiosinkratik seorang presiden suatu negara. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah tokoh yang diteliti yaitu Presiden Indonesia, Joko Widodo, sedangkan penelitian di atas meneliti Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Maka terdapat pembaruan dalam penelitian ini, yaitu faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo dan kebijakan luar negeri Indonesia. Terlebih lagi perbedaan negara penelitian dapat memberikan dampak perbedaan pada faktor idiosinkratik seorang pemimpin.

Penelitian terdahulu yang terakhir ditulis oleh Mohamad Rosyidin dari Universitas Diponegoro yang berjudul “Pragmatisme Multilateral dalam Momen Kekuatan Indonesia di G20 dan ASEAN, 2022-2023”. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis hubungan multilateral Indonesia pada momentum presidensi Indonesia untuk G20 dan ASEAN. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konsep pragmatis. Sehingga penulis berargumen bahwa diplomasi Indonesia pada momen tersebut hanya mengedepankan kepentingan nasional bukan kepentingan kolektif. Dengan berorientasi pada pengerjaan kepentingan jangka pendek terutama aspek ekonomi bukan pada upaya pemecahan masalah internasional (Rosyidin, 2023).

Dengan penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan persamaan pada variabel penelitian mengenai presidensi Indonesia untuk G20. Namun terdapat pula

perbedaan pada penelitian ini, mengenai bagaimana pengaruh idiosinkratik seorang pemimpin, yaitu Presiden Joko Widodo dalam memimpin presidensi Indonesia untuk G20. Pada penelitian terdahulu diatas yang menggunakan prinsip pragmatis berhasil memberikan sudut pandang berbeda dari mayoritas terkait indikator kesuksesan diplomasi Indonesia. Dengan begitu penelitian yang peneliti lakukan akan memberikan pembaruan melalui pengujian keabsahan data dan argumen penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Faktor Idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam Presidensi Indonesia untuk *Group of Twenty* (G20) Tahun 2022”

Penelitian ini didukung oleh beberapa Mata Kuliah Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

1. Diplomasi dan Negosiasi

Mata kuliah ini membantu peneliti memahami dasar-dasar konsep diplomasi dan seni bernegosiasi suatu negara dengan keterwakilan seorang diplomat atau pemimpin negara. Melalui mata kuliah ini peneliti dapat memahami seberapa besar pengaruh kemampuan seorang pelaku diplomasi menegosiasikan kepentingan negaranya pada kancah internasional.

2. Organisasi Internasional

Dalam mata kuliah Organisasi Internasional, peneliti memahami bagaimana mekanisme kerjasama antar negara dengan adanya struktur organisasi internasional. Lalu bagaimana suatu organisasi internasional dapat menentukan dan mencapai kepentingan kolektif negara-negara anggotanya.

3. Politik Luar Negeri Indonesia

Mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia memberikan pemahaman mengenai pola perilaku negara Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang datang dari luar negeri. Hal ini membantu peneliti menganalisis historis dan ideologi yang dianut oleh negara Indonesia dan negara tujuan.

4. Analisis Politik Luar Negeri

Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana pengaruh politik luar negeri suatu negara dapat mempengaruhi respon kebijakan luar negeri negara lain. Dengan mempelajari faktor internal dan eksternal suatu negara, peneliti dapat memahami bagaimana upaya suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, peneliti menentukan rumusan masalah makro sebagai berikut: **“Bagaimana pengaruh faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam memimpin presidensi Indonesia untuk G20 tahun 2022?”**.

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Dalam penelitian ini peneliti menyadari bahwa masalah yang akan diteliti pada suatu hari akan mengalami perkembangan. Hubungan antar variabel yang mengalami perkembangan akan menjadi suatu masalah yang akan diteliti. Maka, peneliti mengidentifikasi masalah makro yang dirumuskan menjadi rumusan masalah mikro sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam proses perumusan agenda prioritas presidensi G20 Indonesia tahun 2022?
2. Bagaimana pengaruh idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam proses pengambilan keputusan pada KTT G20 di Bali?
3. Bagaimana idiosinkratik Presiden Joko Widodo dapat mempengaruhi hubungan antar negara anggota G20?
4. Bagaimana pengaruh idiosinkratik Presiden Joko Widodo pada pemenuhan tujuan bersama G20 dalam momentum presidensi G20 Indonesia tahun 2022?

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, untuk dapat menetapkan parameter dan batasan pada topik pembahasan agar penelitian memiliki struktur yang baik, jelas dan konsisten, peneliti menentukan pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tahun 2021-2022. Tahun 2021 tepatnya pada 31 Oktober merupakan awal mula Indonesia resmi memegang presidensi G20 yang ditandai dengan serah terima palu sidang dari pemegang presidensi G20 sebelumnya yaitu negara Italia kepada Indonesia yang diwakilkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan tahun

2022 merupakan masa periode presidensi Indonesia untuk G20 dan berakhirnya masa presidensi pada 16 November 2022 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang erat kaitannya dengan faktor idiosinkratiknya.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam memimpin presidensi Indonesia untuk G20 2022.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam perumusan agenda prioritas presidensi G20 Indonesia.
2. Mengidentifikasi faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada KTT G20 tahun 2022.
3. Menganalisis pengaruh faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo terhadap hubungan antar-negara anggota G20.
4. Menganalisis faktor idiosinkratik yang terdapat dalam diri Joko Widodo terhadap pemenuhan kepentingan global dalam momentum presidensi G20 tahun 2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru bagi pembaca mengenai gaya kepemimpinan seorang presiden Indonesia dalam

upaya memenuhi kepentingan nasional negara Indonesia di ranah internasional, terkhusus melalui organisasi internasional G20. Juga dapat memahami faktor idiosinkratik Presiden Joko Widodo dalam melakukan praktik diplomasi sebagai pemimpin presidensi G20 2022 melalui perspektif politik luar negeri.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1 Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi pemenuhan tugas akhir sebagai sebuah syarat kelulusan peneliti dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Selain daripada itu, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai bentuk buah karya ilmiah. Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dan memahami perspektif, ilmu dan keterampilan baru yang didapatkan dari hasil analisis pengaruh tokoh pemimpin negara terhadap pemenuhan kepentingan nasional negaranya.

2 Bagi Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional lain untuk lebih bisa memahami mengenai idiosinkratik dalam lingkup hubungan internasional dan menjadi acuan serta pendukung bagi penelitian yang akan datang.